

THE EFFECTIVENESS OF THE JELITA PARASMU PROGRAM AS AN INNOVATION IN THE CIVIL REGISTRATION AND POPULATION SERVICE IN PALIAT VILLAGE, TABALONG REGENCY

Shofy Nabila¹✉, Fakhri², Jumadi³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ✉¹Shfynbla@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: July 18, 2026
Revised: August 10, 2026
Accepted: August 18, 2026
Published: August 31, 2026

Kata Kunci:

Efektivitas Program, JELITA PARASMU, Administrasi Kependudukan.

Keywords:

Program Effectiveness, JELITA PARASMU, Population Administration.

Doi:

<https://doi.org/10.36658/datu.v3.i1.2015>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena masih rendahnya antusiasme publik serta keterbatasan tenaga pelaksana yang menghambat optimalisasi layanan jemput bola dalam sistem administrasi kependudukan. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini bertujuan mengevaluasi efektivitas serta faktor-faktor determinan Program JELITA PARASMU di Desa Paliat melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sebelas informan yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman untuk membedah dinamika di lapangan. Temuan riset menunjukkan bahwa meski program ini berhasil menjangkau seluruh masyarakat masyarakat dan mempermudah pengurusan dokumen, namun aspek sosialisasi dan pemantauan berkelanjutan masih memerlukan perbaikan signifikan karena banyak warga yang belum terpapar informasi jadwal layanan secara akurat. Keberhasilan program ini didorong oleh sinergi kuat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemerintah desa serta dedikasi petugas, namun efektivitasnya tetap terganjal oleh sempitnya durasi pelayanan dan minimnya personil teknis. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan strategi komunikasi publik yang lebih masif, penambahan jumlah staf lapangan, serta sinkronisasi koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan layanan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tabalong.

ABSTRACT

This research was motivated by the phenomenon of low public enthusiasm and limited staff, which hamper the optimization of outreach services in the population administration system. Adopting a descriptive qualitative approach, this study aims to evaluate the effectiveness and determinants of the JELITA PARASMU Program in Paliat Village through data collection techniques of observation, documentation, and in-depth interviews with eleven purposively selected informants. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model to examine the dynamics in the field. The research findings indicate that while the program has successfully reached remote communities and streamlined document processing, aspects of socialization and ongoing monitoring still require significant improvement because many residents have not been exposed to accurate service schedule information. The program's success is driven by strong synergy between the Population and Civil Registration Office and the village government and the dedication of its officers. However, its effectiveness remains hampered by the limited service duration and a lack of technical personnel. Therefore, it is recommended to strengthen public communication strategies more extensively, increase the number of field staff, and synchronize cross-sector coordination to ensure the sustainability of more inclusive services for all levels of society in Tabalong Regency

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan manifestasi paling nyata dari fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dalam paradigma pemerintahan modern, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi guna mewujudkan kesejahteraan umum yang dicita-citakan. Tuntutan terhadap pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan layanan, melainkan menyelenggarakannya dengan kualitas prima yang mencerminkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana akuntabilitas dan responsivitas menjadi tolak ukur utama. Dalam lingkup pemerintahan daerah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara menjadi indikator vital keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah. Ketika birokrasi mampu hadir dan memberikan solusi atas kebutuhan administratif warga secara langsung, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Di antara sekian banyak jenis layanan, administrasi kependudukan menempati posisi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan hak sipil setiap individu sejak lahir hingga meninggal dunia.

Administrasi kependudukan bukan sekadar rutinitas pencatatan administratif, melainkan sebuah sistem komprehensif yang menjadi tulang punggung manajemen negara. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas regulasi sebelumnya, administrasi kependudukan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan. Ruang lingkupnya mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, hingga pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan publik. Sistem ini merekam setiap peristiwa penting dalam siklus hidup manusia, mulai dari kelahiran, perkawinan, perpindahan domisili, hingga kematian. Ketertiban dalam administrasi kependudukan adalah fondasi bagi negara untuk mengetahui jumlah, struktur, dan persebaran warganya, yang mana data tersebut menjadi basis utama bagi perumusan kebijakan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Tanpa sistem pencatatan yang rapi, negara akan mengalami kesulitan dalam memetakan potensi maupun masalah demografi yang ada.

Pentingnya administrasi kependudukan terletak pada fungsi legalitas identitas yang diberikannya kepada setiap warga negara. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran adalah bukti sah kehadiran seseorang di mata hukum negara. Lebih dari sekadar kartu identitas fisik, dokumen-dokumen ini merupakan kunci pembuka akses terhadap berbagai hak konstitusional dan layanan publik lainnya. Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang valid menjadi basis perencanaan alokasi anggaran, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi politik dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, administrasi kependudukan tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai urusan surat-menyurat semata. Ia adalah instrumen strategis yang menentukan keadilan distribusi pembangunan. Jika seseorang tidak memiliki identitas hukum, maka ia berisiko menjadi warga negara yang "tidak terlihat" dan terpinggirkan dari berbagai program kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah.

Meskipun urgensi kepemilikan dokumen kependudukan sangat tinggi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Di banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat pemerintahan, hambatan infrastruktur dan kondisi geografis menjadi kendala utama. Selain faktor fisik, tantangan kultural juga muncul dalam bentuk rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan secara tepat waktu. Masih banyak warga yang menganggap bahwa pembaruan dokumen bukanlah prioritas mendesak, sehingga mereka baru mengurusnya ketika benar-benar membutuhkan layanan lain. Akibatnya, data kependudukan menjadi tidak mutakhir (*up-to-date*) dan banyak warga yang tidak memiliki dokumen lengkap, yang pada akhirnya menghambat mereka dalam mengakses layanan dasar seperti perbankan, kesehatan, maupun bantuan sosial pemerintah.

Guna mengurai benang kusut permasalahan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk keluar dari zona nyaman birokrasi konvensional dan melakukan terobosan melalui inovasi pelayanan publik. Inovasi dalam konteks ini adalah upaya pembaruan metode, strategi, maupun pendekatan pelayanan agar lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan arahan reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik harus mampu memberikan nilai tambah, baik berupa efisiensi waktu maupun kemudahan akses. Pemerintah tidak bisa lagi hanya menunggu masyarakat datang ke loket pelayanan (*passive service*), melainkan harus proaktif menjemput kebutuhan warga. Inovasi diperlukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit, mendekatkan jarak layanan, dan memastikan bahwa hak sipil warga negara dapat terpenuhi tanpa harus membebani mereka dengan biaya transportasi atau waktu tempuh yang lama. Semangat inilah yang mendorong lahirnya berbagai inisiatif kreatif di daerah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada.

Kabupaten Tabalong, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), merespons tantangan tersebut dengan meluncurkan sebuah inovasi strategis yang diberi nama Program JELITA PARASMU. Program ini merupakan akronim atau istilah yang merepresentasikan model pelayanan "jemput bola", di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk melayani masyarakat di tingkat desa. Filosofi dasar dari program ini adalah mendekatkan negara kepada warganya. Dengan membawa peralatan perekaman dan pencetakan dokumen secara mobile, Disdukcapil berupaya menghapus hambatan jarak dan waktu yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Program ini memungkinkan warga untuk mengurus berbagai dokumen krusial seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran langsung di desa mereka sendiri tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor pusat pelayanan di ibu kota kabupaten. Pendekatan ini dinilai sangat relevan untuk diterapkan di wilayah dengan karakteristik geografis yang luas dan tersebar.

Salah satu fokus pelaksanaan Program JELITA PARASMU adalah di wilayah Kecamatan Kelua, yang memiliki beberapa desa dengan jarak tempuh cukup signifikan dari pusat pelayanan di Kota Tanjung. Desa Paliat dipilih sebagai lokasi studi kasus yang representatif karena kondisi geografis dan demografisnya yang mencerminkan tantangan pelayanan di daerah pinggiran. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritas tidak memiliki kemudahan akses transportasi pribadi untuk bolak-balik ke kantor dinas. Jarak yang jauh serta biaya transportasi yang tidak sedikit menjadi beban tersendiri bagi warga Desa Paliat jika harus mengurus administrasi kependudukan dengan cara konvensional. Oleh karena itu, kehadiran layanan jemput bola di desa ini bukan sekadar kemudahan administratif, melainkan sebuah bentuk keadilan akses pelayanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan.

Di Desa Paliat, implementasi Program JELITA PARASMU memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat nyata. Mayoritas penduduk desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor agraris sebagai petani atau bekerja sebagai buruh harian. Bagi kelompok masyarakat ini, waktu adalah uang. Meninggalkan pekerjaan seharian penuh hanya untuk mengurus dokumen administrasi di kota dianggap sebagai kerugian ekonomi karena hilangnya pendapatan harian. Dengan hadirnya petugas Disdukcapil di balai desa, masyarakat dapat mengurus dokumen mereka dengan lebih efisien tanpa harus mengorbankan waktu kerja yang berlebihan. Program ini didesain untuk menyelaraskan ritme birokrasi dengan ritme kehidupan masyarakat desa, sehingga pelayanan publik tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi solusi yang memudahkan. Namun, sebuah kebijakan yang baik di atas kertas, tentu memiliki dinamika tersendiri saat diimplementasikan di lapangan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun niat dan tujuan program ini sangat mulia, efektivitasnya di Desa Paliat masih terkendala oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Kendala pertama dan yang paling krusial adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Temuan observasi menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang cukup lebar. Diseminasi informasi yang terlalu mengandalkan media sosial atau saluran formal perangkat desa ternyata belum mampu menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, terutama kalangan tua atau mereka yang tidak melek teknologi. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui jadwal kedatangan petugas, sehingga melewatkan kesempatan emas tersebut. Selain itu, masih kuatnya persepsi bahwa mengurus dokumen itu rumit atau belum mendesak membuat sebagian warga enggan datang, atau datang terlambat ke lokasi pelayanan, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses administrasi di lapangan.

Selain masalah dari sisi masyarakat, kendala institusional juga menjadi penghambat yang signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tim "jemput bola" yang diturunkan oleh Disdukcapil seringkali memiliki jumlah personel yang tidak sebanding dengan antusiasme atau jumlah warga yang membutuhkan layanan di desa tersebut. Ketidakseimbangan rasio antara petugas dan pemohon layanan menyebabkan beban kerja yang berlebihan (*overload*) pada petugas di lapangan. Petugas seringkali harus merangkap berbagai fungsi teknis sekaligus, yang berimplikasi pada melambatnya proses pelayanan dan potensi ketidaktepatan. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua warga dapat terlayani dalam satu hari kunjungan, menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang sudah mengantre namun gagal memproses dokumennya. Fenomena ini menegaskan bahwa inovasi pelayanan tidak hanya membutuhkan ide kreatif, tetapi juga dukungan manajerial yang kuat, baik dalam hal strategi komunikasi publik maupun manajemen sumber daya manusia agar tujuan pelayanan prima benar-benar tercapai.

Secara etimologis, konsep efektivitas berakar dari bahasa Inggris, yakni *effectiveness*, yang mencakup makna keefektifan, kemanjuran, serta kemampuan untuk membuahkan hasil. Istilah ini memiliki keterkaitan erat dengan kata *effect* yang bermakna dampak atau pengaruh, serta *effective* yang berarti manjur atau berhasil guna. Dalam konteks manajemen dan administrasi publik, pemahaman dasar ini menjadi landasan penting untuk menilai kinerja sebuah organisasi. Efektivitas tidak sekadar berbicara tentang "selesainya" sebuah pekerjaan, melainkan seberapa besar dampak atau "efek" yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut terhadap sasaran yang dituju. Oleh karena itu, sebuah program dikatakan memiliki nilai *effectiveness* apabila ia mampu memberikan impresi, akibat, dan pengaruh nyata yang sesuai dengan ekspektasi awal, bukan sekadar berjalan tanpa arah yang jelas.

Dalam ranah akademis, definisi efektivitas telah banyak dikaji oleh para ahli untuk memberikan batasan yang jelas dalam pengukurannya. Merujuk pada pemikiran Mahmudi yang dikutip dalam studi Jarkasih, dkk (2023), efektivitas digambarkan sebagai hubungan kausalitas antara output (keluaran) dengan tujuan. Logika yang dibangun adalah semakin besar kontribusi yang diberikan oleh output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula sebuah organisasi atau program tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Andisasmita sebagaimana dikutip oleh Ratna Ekasari (2019:20), yang menekankan bahwa efektivitas adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana pemilihan tujuan serta sarana prasarana yang digunakan berjalan selaras, sehingga hasil yang memuaskan dapat tercapai. Ini menunjukkan bahwa efektivitas adalah perpaduan antara ketepatan memilih tujuan dan ketepatan cara mencapainya.

Lebih lanjut, pendalaman mengenai esensi keberhasilan tujuan dijelaskan oleh Lysa Angrayni dan Yusliati (2020:13). Mereka menguraikan bahwa efektivitas yang berasal dari kata "efektif" mengandung makna pencapaian keberhasilan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Inti dari pandangan mereka adalah adanya komparasi atau perbandingan antara "hasil yang diharapkan" (ekspektasi) dengan "hasil yang sesungguhnya dicapai" (realita). Efektivitas di sini mengandung arti kemanjuran atau *effectiveness*, yang menunjukkan seberapa jauh derajat pencapaian hasil nyata tersebut mendekati target idealnya. Senada dengan hal tersebut, Hasan Sadili dalam Nashar (2020:7) menambahkan bahwa istilah efektivitas menunjuk pada taraf pencapaian tujuan, di mana suatu usaha baru bisa diklaim efektif apabila tercapai secara ideal dengan ukuran-ukuran yang relatif pasti dan terukur.

Dari berbagai sintesis pendapat para ahli di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa efektivitas adalah kemampuan kerja baik individu maupun organisasi—dalam merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa efektivitas tidak hanya berhenti pada dimensi "hasil akhir". Konsep ini juga mencakup

pertimbangan mengenai metode, cara, strategi, serta alat yang digunakan dalam proses pencapaiannya. Sebuah organisasi yang mencapai tujuan namun dengan cara yang berantakan atau merusak sistem, tentu memiliki nilai efektivitas yang cacat. Oleh karena itu, efektivitas adalah konsep holistik yang menggabungkan kualitas proses dan kualitas hasil dalam satu tarikan napas manajemen.

Agar sebuah program atau kebijakan publik dapat berjalan sesuai dengan definisi efektivitas tersebut, terdapat variabel-variabel penentu yang harus diperhatikan. Menurut Budiani yang dikutip dalam penelitian Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati (2018), terdapat empat faktor fundamental yang mempengaruhi efektivitas program. Faktor pertama adalah Ketepatan Sasaran Program. Sebuah kebijakan hanya akan efektif jika "pelurunya" mengenai target yang tepat. Artinya, sejauh mana partisipan atau penerima manfaat program tersebut sesuai dengan kelompok sasaran yang telah dipetakan sebelumnya. Faktor kedua adalah Sosialisasi Program. Seringkali program yang bagus gagal karena minimnya komunikasi. Efektivitas sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara dalam mendistribusikan informasi, sehingga masyarakat umum dan khususnya target sasaran memahami mekanisme dan manfaat program tersebut secara utuh.

Melanjutkan teori Budiani dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati (2018), faktor ketiga yang tak kalah krusial adalah Tujuan Program. Poin ini menekankan pada kesesuaian antara hasil pelaksanaan riil di lapangan dengan tujuan normatif yang tertulis dalam perencanaan. Pencapaian tujuan adalah indikator mutlak untuk mengidentifikasi keberhasilan. Faktor keempat adalah Pemantauan Program atau monitoring. Banyak program terhenti di tengah jalan karena dilepas begitu saja setelah peluncuran. Pemantauan adalah kegiatan pasca-pelaksanaan atau yang berjalan beriringan sebagai bentuk atensi kepada peserta program, memastikan bahwa proses berjalan sesuai rel dan deviasi dapat segera dikoreksi. Keempat faktor ini menjadi pisau analisis untuk melihat keberhasilan program-program pemerintah daerah.

Salah satu implementasi nyata dari teori efektivitas dalam pelayanan publik adalah hadirnya program "JELITA PARASMU" di Kabupaten Tabalong. Program ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Latar belakang lahirnya inovasi ini adalah respons terhadap kondisi geografis Kabupaten Tabalong yang luas, di mana masih banyak masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok yang enggan atau kesulitan mengurus dokumen kependudukan karena jarak yang jauh ke pusat layanan. Fenomena masyarakat yang belum melengkapi dokumen kependudukan menjadi masalah serius bagi validitas data negara. Oleh karena itu, Disdukcapil menerapkan strategi "jemput bola", sebuah pendekatan proaktif mendatangi warga, bukan menunggu warga datang, guna memastikan perekaman dan penerbitan dokumen berjalan cepat dan merata.

Lingkup pelayanan dalam JELITA PARASMU dirancang sangat komprehensif, tidak hanya terpaku pada satu jenis dokumen. Program ini melayani perekaman KTP elektronik (KTP-el), penerbitan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian, hingga Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, layanan pembaruan data bagi warga yang mengalami perubahan status atau alamat juga difasilitasi. Pendekatan ini secara langsung memangkas birokrasi dan hambatan fisik. Dengan menghadirkan layanan terpadu ke tengah masyarakat, pemerintah daerah berupaya menghilangkan alasan klasik seperti "biaya transportasi mahal" atau "tidak ada waktu" yang sering menjadi penghambat kepemilikan dokumen sah. Ini adalah bentuk manifestasi prinsip aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pelayanan publik, yang pelaksanaannya turut menggandeng kerja sama lintas sektor mulai dari kecamatan, desa, hingga institusi pendidikan.

Dampak kemanfaatan dari inovasi JELITA PARASMU ini dirasakan secara signifikan oleh dua sisi, yakni masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, keuntungan utamanya adalah kemudahan dan efisiensi biaya. Pelayanan yang gratis, ramah, dan tuntas di tempat dengan dukungan aplikasi SIAK Terpusat membuat masyarakat tidak perlu membuang waktu dan biaya transportasi ke kantor dinas. Sementara bagi pemerintah, program ini vital untuk meningkatkan akurasi data kependudukan (database) dan menertibkan administrasi. Secara strategis, program ini membantu pemerintah mencapai target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan mendukung visi *Smart City* pada dimensi *Smart Governance*. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada predikat Kota Layak Anak (KLA) dengan menjamin hak sipil anak berupa kepemilikan identitas.

Secara spesifik, tujuan inovasi JELITA PARASMU juga menyasar segmen pelajar melalui perekaman biometrik di sekolah-sekolah. Hal ini menjadi solusi cerdas bagi Wajib KTP Pemula yang seringkali terkendala jam sekolah yang bentrok dengan jam operasional kantor dinas (08.00–15.30 WITA). Dengan petugas yang datang ke sekolah, hak pelajar mendapatkan identitas terpenuhi tanpa mengganggu jam belajar. Di sisi lain, integrasi dengan inovasi "Lapat Kaka KIA" semakin mempermudah masyarakat desa terpencil mengurus Akta dan KK. Pada akhirnya, muara dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah peningkatan progres capaian kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh di Kabupaten Tabalong, yang juga menjadi basis data krusial untuk agenda nasional seperti Pemilihan Umum.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Paliat, sebuah wilayah yang secara administratif berada di bawah naungan Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografis desa ini cukup spesifik, berada pada koordinat 2°45' Lintang Selatan dan 115°20' Bujur Timur, dengan kontur wilayah yang bervariasi antara dataran rendah hingga perbukitan pada ketinggian 100 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam Desa Paliat didominasi oleh ekosistem hutan tropis yang hijau, aliran sungai, serta hamparan lahan perkebunan yang luas. Topografi ini didukung oleh jenis tanah berpasir yang subur, menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Secara klimatologis, desa ini memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi, berkisar antara 2.500 hingga 3.500 mm per tahun. Pola musim terbagi menjadi musim kemarau yang berlangsung dari Juni hingga September, serta musim hujan dari Oktober hingga Mei, yang secara langsung mempengaruhi siklus produktivitas pertanian serta memunculkan tantangan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan erosi.

Dari sisi demografi dan sosial ekonomi, Desa Paliat memiliki luas wilayah sekitar 15 km² yang dihuni oleh populasi sekitar 1.839 jiwa. Struktur masyarakatnya cukup homogen namun harmonis, didominasi oleh etnis Banjar dan Dayak yang mayoritas memeluk agama Islam. Sendi perekonomian warga bertumpu pada sektor agraris, dengan mata pencaharian utama sebagai petani padi dan penyadap karet, disamping adanya aktivitas peternakan dan perdagangan skala kecil. Fasilitas publik dan infrastruktur dasar di desa ini mencakup keberadaan sekolah dasar dan menengah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), tempat ibadah berupa masjid, serta pasar tradisional yang menjadi nadi ekonomi warga. Namun, tantangan pembangunan masih terasa, terutama terkait stabilitas pasokan listrik dari PLN yang kerap mengalami gangguan frekuensi, serta keterbatasan akses telekomunikasi digital akibat sinyal internet yang masih lemah di wilayah ini.

Beranjak pada pendekatan metodologis, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam. Pemilihan metode ini didasarkan pada urgensi untuk menggali latar belakang masalah secara komprehensif sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mengukur data angka, melainkan mengungkapkan makna di balik data yang diperoleh melalui proses wawancara intensif dan pengamatan langsung di lapangan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan deskripsi yang logis, kritis, dan reflektif terhadap realitas sosial yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian, sehingga fenomena yang diangkat dapat dipahami secara utuh dan mendalam.

Secara spesifik, tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih sebagai sarana ilmiah untuk mengulas, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan dengan prosedur yang sistematis. Merujuk pada pandangan Sugiyono (2023:54), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis terkait sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam konteks ini, penelitian tidak

berorientasi pada pengujian hipotesis statistik atau menerangkan hubungan kausalitas yang kaku, melainkan lebih fokus pada upaya memotret fenomena sebagaimana adanya guna mendapatkan pemahaman yang otentik.

Basis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya saling melengkapi. Data primer merupakan tulang punggung penelitian ini, berupa informasi, fakta, dan realitas yang digali langsung dari sumber aslinya, yakni para informan yang terlibat langsung atau terdampak oleh Program Jelita Parasmu di Desa Paliat dan Desa Takulat. Data ini mencakup opini subjektif individu maupun kelompok, hasil observasi fisik, serta dinamika kegiatan di lapangan. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pendukung vital yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen resmi dan literatur relevan, yang berguna untuk memperkuat analisis dan memperkaya pembahasan mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti.

Dalam proses penentuan sumber data, penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Williams dalam Sugiyono (2023:20), teknik ini dilakukan dengan pertimbangan rasional dan logis, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu karena mereka dianggap paling mengetahui atau memiliki kompetensi terkait objek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi. Sebanyak 11 informan kunci telah ditetapkan, mulai dari pemangku kebijakan strategis seperti Kepala Dinas Disdukcapil Ir. Rowi Rawatianice, M.T, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Hj. Ernawati, S.Sos, hingga pelaksana di tingkat desa seperti Kepala Desa Muhammad Akhyar, serta representasi masyarakat penerima manfaat seperti Fauziah dan Nurliana.

Untuk membedah efektivitas program yang diteliti, desain operasional penelitian disusun dengan mengacu pada teori evaluasi program yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018). Teori ini membagi variabel penelitian menjadi empat dimensi utama yang terukur. Pertama adalah Ketepatan Sasaran Program, yang melihat kesesuaian penerima manfaat dan pemerataan pelayanan. Kedua, Sosialisasi Program, yang diukur dari pemahaman masyarakat, keterlibatan aparat desa, dan partisipasi publik. Ketiga, Tujuan Program, yang mengevaluasi kesesuaian hasil dengan tujuan awal, tingkat kepuasan masyarakat, serta peningkatan kepemilikan dokumen. Terakhir adalah Pemantauan Program, yang menyoroti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Keempat variabel ini menjadi pisau analisis untuk menilai keberhasilan Program Jelita Parasmu secara objektif.

Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengingat langkah ini adalah fase paling strategis dalam penelitian sebagaimana ditegaskan oleh Hardani dkk (2020) dan Sugiyono (2022). Observasi dilakukan untuk mengamati fakta fisik dan perilaku secara langsung sebagai dasar pengetahuan ilmiah. Wawancara mendalam (in-depth interview) digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dan ide antara peneliti dan responden untuk mengonstruksi makna atas topik tertentu. Sedangkan dokumentasi berperan sebagai rekam jejak peristiwa masa lalu, baik berupa tulisan maupun gambar, yang berfungsi melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015). Proses ini mencakup tiga alur kegiatan yang saling berkaitan. Pertama, Reduksi Data, yang dimulai sejak pengumpulan data di mana peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting dari data mentah yang sangat banyak. Kedua, Penyajian Data (Data Display), di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk teks naratif agar pola hubungan antar data dapat dipahami. Ketiga, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan baru yang sebelumnya masih samar menjadi deskripsi yang jelas dan kredibel berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten.

Terakhir, untuk menjamin keabsahan temuan penelitian, dilakukan uji kredibilitas data sesuai pedoman Sugiyono (2023) dan Sugiyono (2022). Langkah-langkah validasi ini meliputi

perpanjangan pengamatan untuk memastikan konsistensi data, peningkatan ketekunan peneliti dalam menggali informasi, serta triangulasi yang mencakup pengecekan silang antar sumber, teknik, dan waktu. Selain itu, dilakukan pula analisis kasus negatif untuk mencari data yang bertentangan hingga tidak ditemukan lagi perbedaan, penggunaan bahan referensi pendukung, serta member check atau pengecekan kembali data kepada pemberi informasi untuk memastikan kesesuaian persepsi. Serangkaian prosedur ketat ini dilakukan demi menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Jelita Parasmu Sebagai Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Paliat Kabupaten Tabalong

1. Ketepatan Sasaran Program

a. Kesesuaian Penerima Manfaat

Evaluasi mendalam mengenai indikator kesesuaian penerimaan manfaat berfokus pada validasi apakah layanan yang diberikan benar-benar menjangkau kelompok sasaran utama, yakni masyarakat yang memiliki keterbatasan akses fisik maupun geografis menuju kantor Disdukcapil. Berdasarkan sintesa hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa aspek ini telah berjalan secara efektif. Terlihat adanya harmoni yang kuat antara tujuan strategis program dengan kebutuhan riil warga. Pernyataan dari para informan mempertegas bahwa manfaat program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada keseharian mereka. Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa program ini berhasil memangkas birokrasi, memberikan percepatan layanan, serta menciptakan efisiensi yang signifikan dari sisi biaya transportasi dan waktu yang harus dikorbankan warga, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar relevan dan tepat guna bagi mereka yang membutuhkan.

Secara akademis, keberhasilan implementasi ini memperkuat validitas teori efektivitas yang digagas oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018), spesifiknya pada variabel ketepatan sasaran dengan indikator kesesuaian penerimaan manfaat. Teori ini mempostulasikan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada ketepatan distribusi manfaat kepada entitas yang paling membutuhkan. Program JELITA PARASMU terbukti telah memenuhi kualifikasi indikator tersebut secara komprehensif. Penyaluran layanan yang presisi kepada warga yang membutuhkan menjadi bukti bahwa program tidak salah sasaran. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme yang dijalankan telah sesuai dengan konsep ketepatan sasaran dalam literatur evaluasi kebijakan, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari output layanan, melainkan dari ketepatan subjek penerima manfaat itu sendiri.

b. Pemerataan Pelayanan

Pemerataan pelayanan merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara dalam pengurusan dokumen kependudukan. Indikator ini menuntut adanya layanan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Namun, berdasarkan analisis data lapangan melalui wawancara dan observasi, ditemukan bahwa aspek pemerataan ini masih tergolong kurang efektif. Meskipun jangkauan layanan secara umum telah menyentuh berbagai segmen masyarakat, kendala operasional berupa keterbatasan jumlah personel pelayanan menjadi hambatan yang signifikan. Defisit sumber daya manusia ini berimplikasi langsung pada lambatnya proses administrasi, terjadinya penumpukan antrean, serta waktu tunggu yang relatif lama bagi pemohon. Oleh karena itu, diperlukan intervensi manajerial berupa penambahan aparatur dan peningkatan fasilitas pendukung agar pelayanan tidak hanya sekadar ada, tetapi juga berjalan optimal dan efisien.

Temuan empiris di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas

implementasi dengan kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalmunthe, dan Yusriati, 2018), khususnya pada dimensi Ketepatan Sasaran sub-indikator Pemerataan Pelayanan. Pelaksanaan program JELITA PARASMU dinilai belum sepenuhnya selaras dengan standar ideal konsep tersebut karena adanya hambatan kapasitas internal. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan distribusi layanan tidak berjalan mulus, sehingga tujuan pemerataan yang dicitakan teori belum tercapai secara utuh. Hal ini menempatkan status keberhasilan program pada kategori kurang efektif, di mana faktor input (petugas) yang belum memadai menghambat output (layanan merata) yang diharapkan dalam teori kebijakan publik.

2. Sosialisasi Program

a. Pemahaman Masyarakat

Tingkat keberhasilan partisipasi warga dalam layanan jemput bola Program JELITA PARASMU sangat ditentukan oleh kedalaman pemahaman mereka mengenai tujuan, manfaat, prosedur, hingga jadwal pelaksanaan. Sayangnya, data empiris yang diperoleh melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat saat ini masih berada pada taraf yang kurang efektif. Permasalahan utama yang teridentifikasi bukan terletak pada ketidaktahuan warga akan manfaat program, melainkan pada keterlambatan arus informasi, khususnya terkait kepastian jadwal pelaksanaan. Warga sering kali baru menerima kabar ketika kegiatan sudah berjalan atau bahkan telah berakhir, yang secara otomatis menyebabkan rendahnya angka kehadiran dan partisipasi yang tidak tepat waktu. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi komunikasi publik yang diterapkan saat ini belum optimal dalam menjangkau sasaran secara real-time, sehingga memerlukan pembenahan mendesak pada pola distribusi informasi agar lebih terencana.

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar efektivitas yang dirumuskan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalmunthe, dan Yusriati, 2018), khususnya pada variabel sosialisasi program dengan indikator pemahaman masyarakat. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman warga terhadap Program JELITA PARASMU belum merata dan secara kualitatif masih tergolong dalam kategori kurang efektif. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun proses sosialisasi secara teknis telah dilakukan oleh pelaksana, namun dampaknya belum cukup kuat untuk membangun kognisi masyarakat yang menyeluruh di semua lapisan. Oleh karena itu, diperlukan intensifikasi dan evaluasi mendalam terhadap metode sosialisasi yang digunakan, agar informasi tidak hanya sekadar sampai, tetapi juga dipahami tepat waktu demi memenuhi indikator keberhasilan program sebagaimana digariskan dalam landasan teori tersebut.

b. Keterlibatan Aparat Desa

Partisipasi aktif perangkat desa merupakan elemen fundamental dalam memastikan arus informasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Peran ini melampaui sekadar pemberitahuan administratif; ia mencakup koordinasi intensif, edukasi, hingga pendampingan teknis di lapangan. Berdasarkan analisis data observasi dan wawancara, kinerja aparat di Desa Paliat tergolong sangat efektif. Mereka menunjukkan dedikasi tinggi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi kegiatan, secara proaktif membantu warga menavigasi prosedur dan persyaratan layanan yang seringkali membingungkan. Kontribusi nyata ini tidak hanya memperlancar proses sosialisasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik, sehingga program pelayanan dapat diterima dan dipahami secara komprehensif oleh warga setempat sebagai penerima manfaat utama.

Validitas temuan ini semakin kuat ketika disandingkan dengan perspektif teoritis Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018) mengenai

efektivitas program. Dalam aspek Sosialisasi Program, indikator keterlibatan aparat desa terbukti menjadi pilar penyangga utama. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa partisipasi perangkat desa yang bersifat langsung, partisipatif, dan berkelanjutan adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan program di level desa. Tanpa dukungan struktural dari aparat desa yang memahami medan sosial masyarakatnya, implementasi kebijakan berisiko mengalami hambatan. Oleh karena itu, sinergi yang terbangun di Desa Paliat menjadi bukti empiris betapa krusialnya peran aparat desa dalam menjembatani kesenjangan informasi dan menjamin keberhasilan operasional program pemerintah.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam mengukur keberhasilan sebuah layanan, yang tecermin melalui kehadiran dan keaktifan warga dalam memanfaatkan fasilitas administrasi kependudukan. Tingginya antusiasme masyarakat sejatinya menjadi indikator utama bahwa sosialisasi program telah berjalan efektif dan diterima dengan baik. Namun, berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara dan observasi, implementasi Program JELITA PARASMU dinilai kurang efektif dalam memobilisasi partisipasi warga. Keterlibatan masyarakat yang terjadi cenderung tidak merata dan belum optimal. Fenomena ini dipicu oleh berbagai kendala realitas, mulai dari keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan, adanya disparitas dan keterlambatan akses informasi, hingga pola pikir sebagian masyarakat yang masih menganggap urusan pembaruan dokumen kependudukan bukanlah prioritas yang mendesak untuk diselesaikan segera.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dengan kerangka teori yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018), khususnya pada aspek Sosialisasi Program dengan indikator Partisipasi Masyarakat. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif sebagai bukti keberhasilan sosialisasi. Sayangnya, hasil penelitian ini memperlihatkan hal yang kontradiktif; meskipun kegiatan pelayanan telah tersedia, partisipasi yang muncul masih bersifat parsial. Ketidakmerataan ini menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi program yakni mendorong keterlibatan kolektif seluruh lapisan masyarakat secara aktif dan menyeluruh belum sepenuhnya tercapai, sehingga memerlukan evaluasi strategi pendekatan yang lebih intensif di masa mendatang.

3. Tujuan Program

a. Kesesuaian Hasil dengan Tujuan

Evaluasi mendalam mengenai kesesuaian hasil dengan tujuan memperlihatkan bahwa implementasi kegiatan di Desa Paliat telah mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Indikator keberhasilan ini terlihat jelas dari kemampuan program dalam merealisasikan target utamanya, yaitu menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mudah diakses dan dekat dengan jangkauan masyarakat. Berdasarkan triangulasi data antara wawancara dan observasi lapangan, ditemukan fakta bahwa hambatan aksesibilitas yang selama ini menjadi kendala berhasil diminimalisir secara signifikan. Masyarakat memberikan respon positif karena secara nyata merasakan efisiensi biaya dan waktu pengurusan, sementara bukti fisik di lapangan menunjukkan proses distribusi dokumen berjalan tertib dan lancar. Kondisi ini menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga tanpa birokrasi yang berbelit.

Validitas temuan empiris tersebut diperkuat oleh perspektif teoritis Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018) yang menekankan urgensi indikator kesesuaian hasil dengan tujuan dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan. Merujuk pada teori ini, efektivitas program dinilai tercapai apabila outcome yang dihasilkan tegak lurus dengan perencanaan awal, baik dari sisi kemanfaatan praktis

maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks penelitian ini, keselarasan antara output layanan dengan target perencanaan menjadi bukti kuat efektivitas program. Hal ini menandakan bahwa strategi yang diterapkan telah tepat sasaran, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik tercapai sesuai dengan skema yang telah dirancang sebelumnya.

b. Kepuasan Masyarakat

Indikator kepuasan masyarakat berfungsi sebagai barometer krusial untuk mengukur sejauh mana urgensi kebutuhan publik dapat terakomodasi oleh sebuah program, sekaligus memastikan bahwa manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata. Berdasarkan hasil penelusuran melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, implementasi kegiatan ini terbukti efektif dan memuaskan. Masyarakat memberikan respon positif karena program ini mampu memangkas kerumitan birokrasi, menawarkan kemudahan substansial dalam pengelolaan dokumen kependudukan. Realitas di lapangan pun mendukung persepsi tersebut, terlihat dari ketertiban alur pelayanan dan responsivitas petugas yang sigap, sehingga tujuan program tidak hanya sekadar target di atas kertas, melainkan menjadi solusi konkret yang dirasakan langsung dampaknya oleh warga.

Secara teoritis, keberhasilan ini mengafirmasi pandangan Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, & Yusriati, 2018) mengenai aspek tujuan program, di mana kepuasan masyarakat ditempatkan sebagai indikator validitas keberhasilan layanan. Perspektif ini menegaskan bahwa sebuah program dikatakan berhasil apabila proses dan hasilnya selaras dengan harapan pengguna layanan. Temuan studi pada program JELITA PARASMU menunjukkan konsistensi penuh dengan teori tersebut, mengingat masyarakat merasakan adanya transformasi kualitas pelayanan yang signifikan. Kemudahan akses, kecepatan proses, dan efisiensi yang ditawarkan program ini telah berhasil menciptakan sentimen kepuasan yang tinggi, membuktikan bahwa program tersebut telah berjalan sesuai koridor teoritis dalam memberikan manfaat yang optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat luas.

c. Peningkatan kepemilikan Dokumen

Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi menjadi bukti nyata kemanfaatan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat setelah kegiatan ini berlangsung. Berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan, terlihat bahwa upaya peningkatan kepemilikan dokumen ini telah berjalan sangat efektif. Temuan di lapangan menunjukkan sinergi data yang konsisten; di mana hasil wawancara mengonfirmasi adanya lonjakan kuantitas warga yang berhasil menyelesaikan pengelolaan dokumen, sedangkan observasi merekam dinamika pelayanan yang aktif dan dipadati oleh partisipasi warga. Keselarasan antara narasi yang disampaikan responden dengan fakta visual di lapangan ini menjadi validasi kuat bahwa program tersebut telah sukses mencapai tujuan strategisnya dalam memperluas jangkauan kepemilikan legalitas kependudukan bagi masyarakat luas.

Secara teoretis, keberhasilan empiris ini berkorelasi positif dengan kerangka konsep yang dipaparkan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018) terkait aspek Tujuan Program, spesifiknya pada indikator peningkatan kepemilikan dokumen. Teori ini menekankan bahwa efektivitas sebuah program dinilai dari kesesuaian antara hasil riil yang diperoleh dengan sasaran awal yang telah diproyeksikan. Program JELITA PARASMU dinilai telah memenuhi kaidah teoretis tersebut, ditandai dengan adanya transformasi signifikan pada status warga yang sebelumnya tidak memiliki kelengkapan administrasi kini menjadi tertib administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi program benar-benar tepat sasaran dan berimplikasi positif terhadap pemenuhan hak sipil warga, sehingga tujuan program dapat dikatakan tercapai dengan optimal dan efektif.

4. Pemantauan Program

a. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi merupakan instrumen krusial dalam siklus manajemen program yang berfungsi untuk menakar sejauh mana capaian keberhasilan sekaligus memetakan berbagai kendala operasional yang timbul selama implementasi. Temuan empiris melalui wawancara dan observasi di lapangan mengonfirmasi bahwa pelaksanaan evaluasi oleh Disdukcapil telah berjalan secara efektif. Langkah ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan dijalankan sebagai upaya strategis untuk mengidentifikasi hambatan teknis secara dini. Hasil dari penilaian tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai basis data utama dalam merancang langkah perbaikan yang konstruktif, sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Keselarasan antara praktik di lapangan dengan tujuan normatif evaluasi ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal telah berfungsi dengan baik demi menjamin program berjalan sesuai koridor yang diharapkan.

Signifikansi temuan tersebut semakin kuat ketika dianalisis menggunakan perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018). Fenomena ini relevan dengan aspek pemantauan program, khususnya pada indikator pelaksanaan evaluasi. Teori ini mendefinisikan evaluasi sebagai serangkaian tindakan sistematis untuk memvalidasi apakah realisasi program tetap berada pada jalur perencanaan dan mampu memberikan dampak positif yang nyata. Sebagaimana ditekankan oleh Budiani, sebuah evaluasi dapat dikatakan efektif apabila dilakukan secara terarah, konsisten, dan berkala. Keterkaitan antara teori dan praktik di Disdukcapil membuktikan bahwa evaluasi yang dilakukan telah berorientasi pada solusi (solution-oriented), yang pada akhirnya menjamin adanya perbaikan berkelanjutan bagi implementasi program di masa mendatang.

b. Tindak Lanjut Evaluasi

Tindak lanjut evaluasi merupakan fase strategis pasca-evaluasi yang tidak hanya berfokus pada perbaikan kekurangan, tetapi juga penguatan aspek positif guna memastikan tujuan program tercapai secara optimal. Berdasarkan analisis data lapangan yang bersumber dari wawancara dan observasi, pelaksanaan tindak lanjut ini dinilai sudah berjalan cukup efektif, meskipun implementasinya masih cenderung parsial dan belum menyentuh aspek menyeluruh. Secara spesifik, pelaksana telah melakukan perbaikan nyata dalam hal koordinasi dan penyampaian informasi, namun langkah tersebut belum cukup kuat untuk mengurai hambatan teknis yang bersifat struktural. Dengan demikian, terdapat keselarasan temuan yang mengindikasikan bahwa meskipun respon perbaikan telah dilakukan, upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal dalam menuntaskan kendala operasional yang ada di lapangan.

Ditinjau dari perspektif akademis, temuan ini relevan dengan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Amrizal, Dalimunthe, dan Yusriati, 2018), khususnya pada dimensi pemantauan program dengan indikator tindak lanjut evaluasi. Penerapan tindak lanjut pada program JELITA PARASMU secara substansial telah sesuai dengan alur teori Budiani, namun predikat efektivitasnya masih berada pada level 'cukup'. Hal ini disebabkan karena perbaikan yang dijalankan belum mampu menyelesaikan hambatan utama secara tuntas. Kondisi ini menegaskan bahwa agar prinsip efektivitas menurut Budiani dapat terpenuhi secara paripurna, diperlukan penguatan strategi tindak lanjut yang lebih komprehensif dan mendalam, bukan sekadar perbaikan yang bersifat permukaan semata.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Jelita Prasmu Sebagai Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Paliat

1. Faktor Pendukung

- a. Pelaksanaan Program yang sesuai dengan tujuan
- b. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Masyarakat

- c. Ketepatan Sasaran Program yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
- d. Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan yang di Berikan.
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan Waktu dan Kesibukan Masyarakat
 - b. Keterbatasan Jumlah petugas membuat proses pelayanan menjadi lambat
 - c. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi yang Belum Merata

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam dan uraian komprehensif yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas Program JELITA PARASMU sebagai sebuah inovasi strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Desa Paliat, Kabupaten Tabalong, secara umum telah berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mempermudah akses administrasi kependudukan bagi masyarakat desa. Keberhasilan ini terpotret jelas melalui empat indikator utama, di mana indikator ketepatan sasaran dinilai sangat efektif karena intervensi program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang urgen, seperti warga yang belum memiliki dokumen, kelompok rentan, serta mereka yang terkendala jarak geografis, berkat proses verifikasi data yang ketat antara pemerintah desa dan Disdukcapil. Selanjutnya, pada aspek pemahaman masyarakat, program ini berada pada kategori cukup efektif; meskipun terdapat sedikit kendala terkait pemahaman teknis persyaratan di tahap awal, namun melalui pendekatan persuasif dan penjelasan langsung dari petugas, antusiasme dan kepatuhan warga untuk berpartisipasi meningkat signifikan. Indikator ketiga, yakni pelaksanaan program, menunjukkan efektivitas yang tinggi berkat alur pelayanan yang tertib dan dukungan penuh aparat desa yang proaktif dalam memfasilitasi tempat, mengatur antrean, hingga mendampingi warga, sehingga menciptakan suasana pelayanan yang nyaman dan lancar. Sementara itu, indikator pemantauan program dinilai cukup efektif namun masih menyisakan ruang perbaikan, mengingat evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh dalam menuntaskan kendala teknis di lapangan, sehingga memerlukan mekanisme tindak lanjut yang lebih intensif ke depannya. Di balik capaian tersebut, dinamika implementasi program ini tidak terlepas dari pengaruh faktor penghambat dan pendukung yang saling berkelindan. Faktor penghambat utamanya bersumber dari keterbatasan waktu masyarakat yang mayoritas memiliki kesibukan tinggi, serta belum meratanya jangkauan sosialisasi informasi yang menyebabkan sebagian warga terlambat mengetahui detail program. Sebaliknya, faktor pendukung yang sangat krusial adalah tingginya keterlibatan aktif aparat desa sebagai jembatan komunikasi dan koordinator lapangan yang handal, serta akurasi penargetan program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat akan dokumen kependudukan, menjadikan Program JELITA PARASMU sebagai solusi birokrasi yang relevan, efisien, dan tepat guna bagi warga Desa Paliat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D., Dalimunthe, A. H., & Yusriati. (2022). Penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada. Medan: CV Manhaji.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2023). *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur*. Fakultas Ekonomi
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.